



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Juli 2021 sampai 30 September 2021

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

3,93 / 98,26%

Jumlah	151 RESPONDEN
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 86 PEREMPUAN : 65
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 1 SD : 3 Diploma 3 : 3 SMP : 0 S1 : 34 SMU : 105 S2 : 5 Diploma 1 : 0 S3 : 0
Pekerjaan	PNS : 5 SWASTA : 67 TNI : 0 WIRAUSAHA : 24 POLRI : 7 TENAGA KONTRAK : 1 LAINNYA : 47

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	3,887
2. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	3,914
3. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	3,914

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Pimpinan telah melakukan pembinaan dan pengarahan dalam memberikan pelayanan yang dikehendaki oleh pelanggan sebagai pengguna layanan publik;
2. Pimpinan telah membuat Hakim Pengawas PTSP untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan petugas PTSP dan melakukan Briefing ke Petugas PTSP
3. Mengingat visi dan misi PN Singaraja Kelas I B mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil kinerja yang baik, transparan dan berkualitas
4. Segala transaksi pembayaran dilakukan di PTSP yang sifatnya terbuka dan satu pintu dan diberikan kwitansi pembayaran;
5. Dibuatkannya baner yang berisikan biaya-biaya yang ada di Pengadilan dan ditempatkan pada ruang pelayanan dan segala informasi yang mengenai biaya-biaya telah dimasukkan dalam WEBSITE Pengadilan Negeri Singaraja
6. Untuk menghindari percaloan telah dibuatkan aplikasi Singa_Instance (Sistem Informasi Gabungan antar Instansi) dan Siarta (Sistem Informasi Auto Respond dan Tanggap)

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Jakarta, 1
Desember
2021
Direktur
Jenderal
Badan
Peradilan
Umum

PRIM
HARYADI